



DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

UPAYA PENINGKATAN TRANSPARANSI ANGGARAN DALAM DOKUMEN APBN

Dialog APBN
Jakarta, 2 Maret 2022





Dasar Hukum Transparansi Anggaran

UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Penjelasan:

Memuat asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

- akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- profesionalitas;
- proporsionalitas;
- **keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;**
- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.



Di Batang tubuh, UU KN juga memuat timeline perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBN (Siklus APBN)

UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 9

- 1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- 2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.**

Reformasi Birokrasi (mulai tahun 2007)



Dasar Hukum Transparansi Anggaran (lanjutan)

UU No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

Pasal 2 ayat (1) huruf c:

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:

(c) Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data

Aspek Transparansi Anggaran dan Manfaatnya



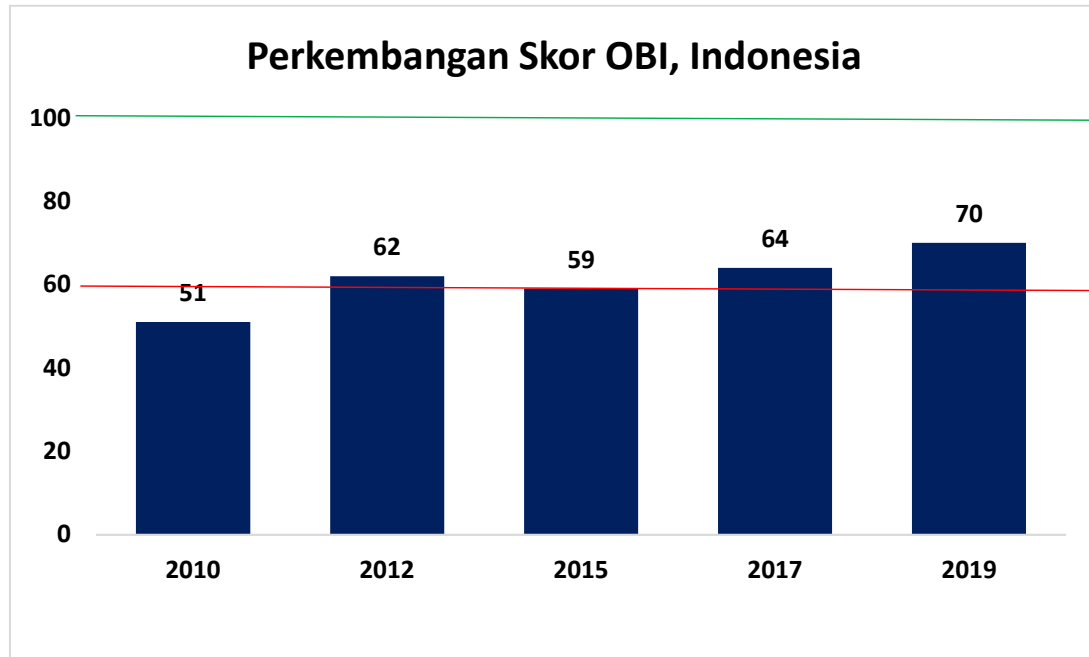
Manfaat Transparansi Anggaran

1. Menjaga tali persatuan dan kesatuan (dalam konteks NKRI) (Nasution, 2009).
2. Meningkatkan kepercayaan di sisi ekonomi dan politik (Hameed, 2005; Benito & Bastida, 2009)
3. Peningkatan atas Fungsi Distribusi (Hong & Cho, 2018).
4. Mendongkrak aliran investasi terutama foreign direct investment (FDI) (Cicatiello et al., 2021).
5. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Capasso et al., 2020).

Obyek Transparansi Anggaran Menurut Open Budget Index

NO	Obyek	Dokumen di Indonesia	Waktu Penyampaian
1.	Pre-Budget Statement/PBS	Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF)	Mei T-1
2.	Executive Budget Proposal (EBP)	Nota Keuangan dan RAPBN	Agustus T-1
3.	Citizen Budget (CB)	Informasi APBN	Bersamaan dengan publikasi NK dan RAPBN atau NK dan APBN
4.	Enacted Budget	Nota Keuangan dan APBN	Tidak ada aturan, paling lambat akhir T-1
5.	In-Year Reports (IYR)	Laporan Realisasi Anggaran atau saat ini dalam bentuk APBN Kinerja dan Fakta (sejak 2017)	Sekurang-kurangnya 30 hari setelah akhir bulan berkenaan
6.	Mid-Year Review (MYR	(Laporan Semester I APBN	Juli T0
7.	Year-End Report (YER)	LKPP yang disampaikan ke BPK (LKPP Unaudited)	3 bulan setelah T0 berakhir
8.	Audit Report (AR)	LKPP audited	6 bulan setelah T0 berakhir disampaikan ke DPR

Perkembangan Skor Transparansi Anggaran Indonesia

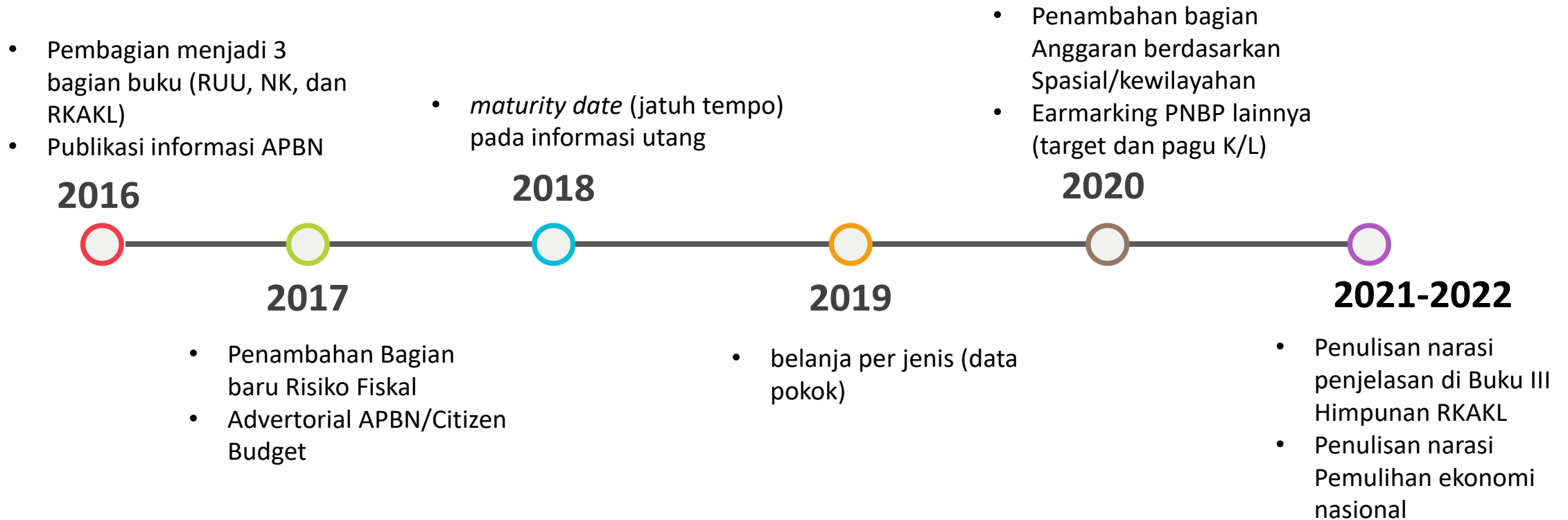


Sumber: Open Budget Index, 2019



Pada tahun 2019, skor transparansi anggaran mencapai 70, atau jauh meningkat dibandingkan tahun 2010 yang hanya berkisar 51. Skor yang dicapai Indonesia pada tahun 2019 atau di atas rata-rata dunia yang hanya mencatatkan skor 45. Di tingkat Kawasan regional, Indonesia berada di atas negara mitra ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

UPAYA PENINGKATAN TRANSPARANSI ANGGARAN DALAM NOTA KEUANGAN DAN APBN



TRANSPARANSI ANGGARAN DI MASA PANDEMI

Pemuatan PEN dalam Dokumen APBN

BOKS 2.2

PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN COVID-19

Kinerja dan realisasi belanja negara dalam semester I tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh program-program strategis yang ditempuh Pemerintah dalam rangka penanggulangan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional, utamanya dalam bidang kesehatan, bidang perlindungan sosial, dan bidang sektoral K/L.

Untuk **bidang kesehatan**, dukungan pendanaan akan diarahkan antara lain untuk: (1) pengadaan sarpras dan alat Kesehatan, (2) biaya perawatan pasien; dan (3) insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan. Selain itu, dukungan pendanaan juga diberikan dalam bentuk bantuan iuran jaminan kesehatan nasional bagi kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3 untuk menjaga kesinambungan program BPJS Kesehatan. Sampai dengan paruh pertama tahun 2020, kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan, baik melalui alokasi dana siap pakai Gugus Tugas Covid-19, maupun alokasi tambahan kepada instansi terkait (seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan).

Selanjutnya, untuk pelaksanaan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di **bidang perlindungan sosial**, sebagian kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal, seperti PKH untuk 10 juta KPM, program Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, paket sembako Jabodetabek untuk 1,9 juta KPM, dan bansos tunai (BST) non-Jabodetabek untuk 8,8 juta KPM sebesar Rp15,6 triliun. Sementara itu, Program Kartu Prakerja telah dilaksanakan untuk 680 ribu peserta, yang terus akan disempurnakan desain programnya sesuai review yang dilakukan.

Penyampaian program PEN di Laporan Semester I APBN 2020 memberikan komitmen Pemerintah dalam transparansi APBN di masa pandemi

Konsultasi PEN dengan DPR RI



Komunikasi eksekutif dan legislatif dilakukan secara intensif. Pelaksanaan Program PEN selalu dilakukan evaluasi antara Pemerintah dan DPR RI.

Penyampaian Realisasi PEN dalam Portal data PEN



Penyampaian realisasi PEN secara periodik di portal data <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/data-realisasi>



DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

